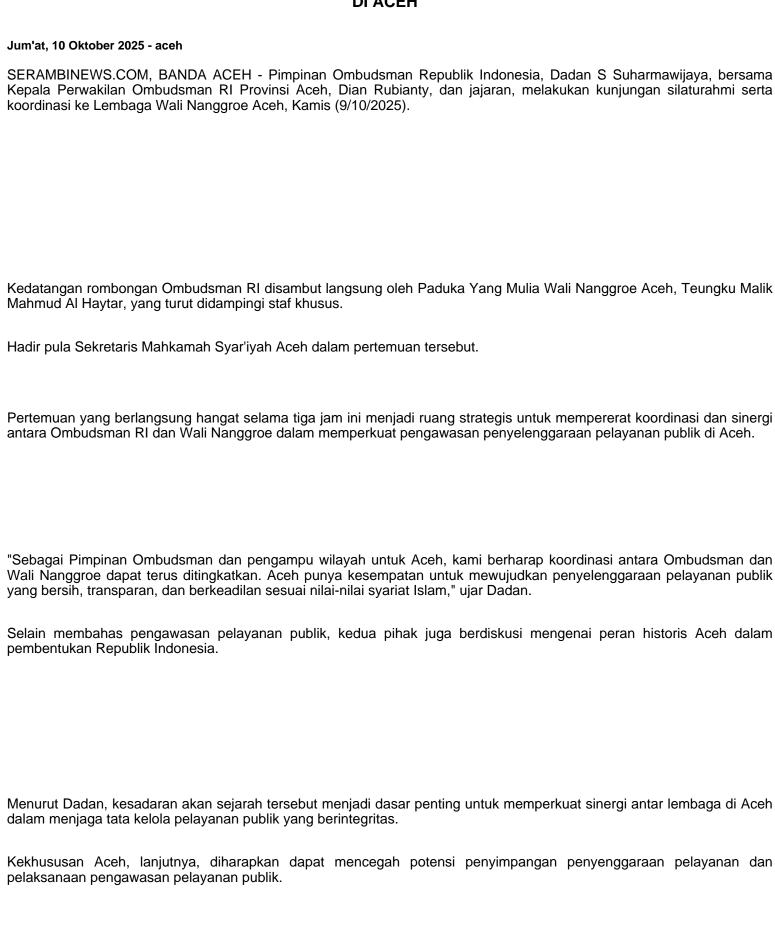
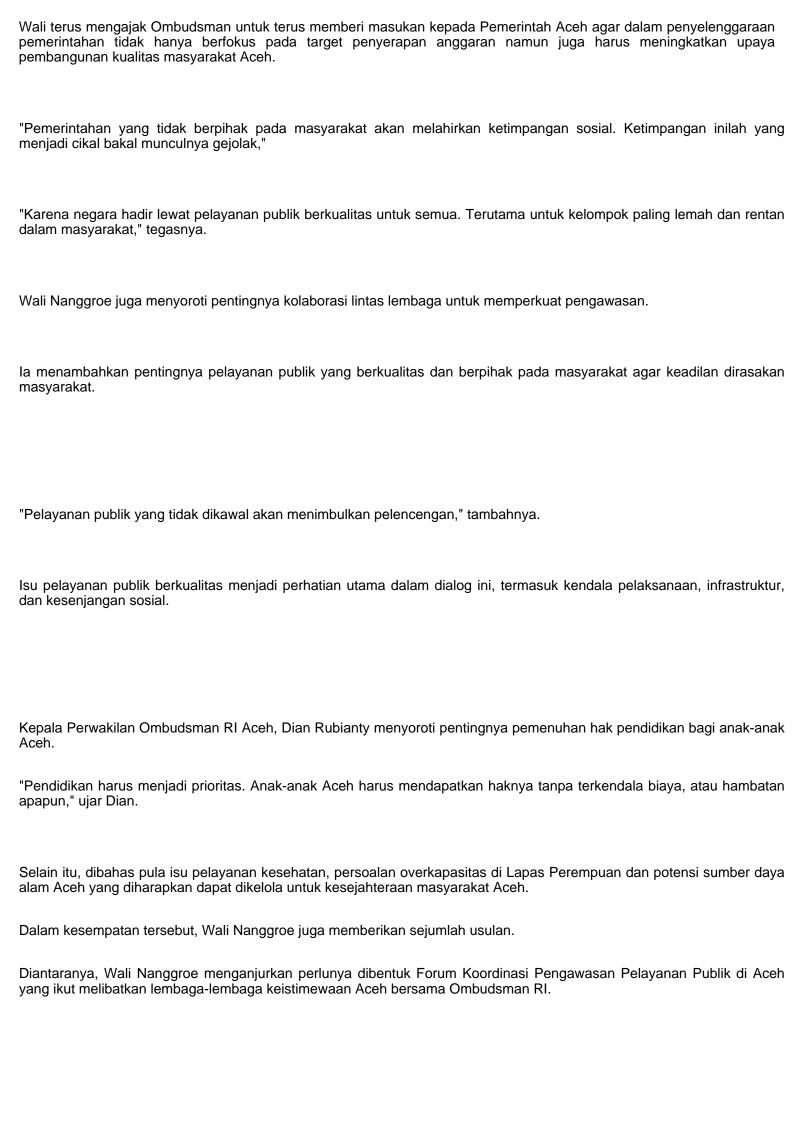
OMBUDSMAN RI DAN WALI NANGGROE PERKUAT SINERGI PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI ACEH



Sementara itu, Wali Nanggroe Teungku Malik Mahmud Al Haytar menegaskan bahwa pelayanan publik harus berpihak pada masyarakat dan berorientasi pada keadilan sosial.



Lewat forum ini pengawasan berbasis nilai-nilai adat dan syariat, peningkatan literasi akan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, serta sinergi antar lembaga-lembaga pelayanan publik dan lembaga-lembaga keistimewaan Aceh dapat dikembangkan.
Dadan menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan bahwa Wali Nanggroe akan menjadi pemersatu dalam pelaksanaan forum ini.
"Kami ingin terus bersinergi dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang berlandaskan pada syariat dan keistimewaan Aceh,"
"Semoga Lembaga Wali Nanggroe Aceh menjadi pengisi roh value dan moralitas tertinggi tata kelola pemerintahan di Aceh bersama Ombudsman RI" tegas Dadan.